

BAB II

Tinjauan Umum Penahanan Dan Penangguhan Penahanan

A. Tinjauan Umum Penahanan

1. Pengertian Penahanan

Pengertian Penahanan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, hal ini diatur dalam KUHAP yakni dalam Bab 1 butir 21. KUHAP hanya mengatur dalam rincian pasal tentang materi penangguhan penahan yang menyangkut jaminan uang atau orang dan pejabat yang berwenang menetapkan penangguhan penahanan serta keberadaan tersangka atau terdakwa jika melarikan diri dari status penangguhan penahan.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan.⁵ Pendapat lain mengatakan bahwa penahanan pada dasarnya adalah

⁵ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. Hal 19

suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang. Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.⁶

Berbeda dengan bentuk perampasan kemerdekaan yang lain yaitu penangkapan yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik saja maka penahanan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam setiap jenjang tahapan sistem peradilan pidana. Pada tahap penyidikan penyidik dapat melakukan penahanan, dalam tahap penuntutan penuntut umum dapat melakukan penahanan dan tahap pemeriksaan di Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (Pengadilan Banding) dan Mahkamah Agung (Pengadilan Kasasi), hakim dapat melakukan penahanan yang lamanya telah diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 29 KUHAP.

Sebagai bentuk perampasan kemerdekaan penahanan seperti halnya penangkapan pada prinsipnya bertentangan dengan hak kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. Oleh karena itu demi kepentingan umum penahanan dapat dilakukan dengan persyaratan yang ketat.

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 1996. Hal 16.

Persyaratan yang ketat tersebut dapat dilihat pada alasan untuk melakukan penahanan. Alasan penahanan yang bersifat subjektif yaitu alasan penahanan yang digantungkan pada pandangan/penilaian pejabat yang menahan terhadap tersangka atau terdakwa. Alasan ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) di mana pejabat yang berwenang menahan dapat menahan tersangka/terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka/terdakwa di khawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta dikuatirkan mengulangi tindak pidana lagi.

KUHP selain mengatur alasan penahanan yang bersifat subjektif, juga mengatur alasan penahanan yang bersifat objektif dalam Pasal 21 Ayat (4). Alasan penahanan objektif yaitu alasan penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Dari alasan objektif ini jelas bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 ke atas serta tindak pidana sebagaimana disebutkan secara limitatis dalam Pasal 21 Ayat (4) sub d.

Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud di atas, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, diatur

dalam Pasal 24 KUHAP sampai dengan Pasal 29 KUHAP, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari.
- b. Pada tingkat penuntutan diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari.
- c. Pada tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan Negeri paling lama 60 hari.
- d. Pada tingkat Pemeriksaan Pengadilan Tinggi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari.
- e. Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Kasasi, diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, di mana jangka waktu penahanan paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 60 hari.

Di samping itu, dalam Pasal 29 KUHAP juga diatur mengenai ketentuan mengenai pengecualian jangka waktu penahanan, hal mana dimungkinkannya perpanjangan penahanan dengan waktu maksimal

60 hari di setiap tingkatan, yaitu dalam hal tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih.

Kewenangan menanggihkan penahanan dengan sendirinya tanggal (lepas) apabila tahanan sudah beralih menjadi tanggung jawab yuridis ke instansi yang lain. Penyidik hanya berwenang menanggihkan penahanan, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridisnya. Jika tanggung jawab yuridis atas penahanan sudah beralih ke tangan penuntut umum, tanggal kewenangan penyidik, terhitung sejak saat terjadi peralihan penahanan kepada instansi penuntut umum, dan seterusnya.⁷

2. Alasan, Syarat, dan Tujuan Penahanan

Dapat kita temui pengaturannya dalam Pasal 20 KUHAP, yakni:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

⁷ M. Yahya Harahap, Op.cit. Hal 213.

Syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.”

Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan.

Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).”

Pasal 21 ayat (4) KUHAP ini dikenal dengan syarat penahanan objektif. Artinya ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tersangka/terdakwa ini melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal-Pasal sebagaimana diatur dalam huruf b di atas.

Mengenai fungsi dilakukannya penahanan dapat kita ketahui secara implisit dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”:

- a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti
- c. Atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

Jadi, fungsi dilakukannya penahanan itu adalah mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.⁸ Semua keadaan yang mengkhawatirkan disini adalah keadaan yang meliputi subjektivitas tersangka atau terdakwa. Dan pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran itupun bertitik tolak dari penilaian subjektif.

3. Penahanan dalam Penyidikan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik melakukan penahanan. Begitu halnya dengan jaksa dan hakim untuk kepentingan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan

⁸ Hukumonline, *Fungsi Penangkapan dan Penahanan dalam Proses Penyidikan*, dalam <http://www.hukumonline.com>, akses 24 Oktober 2017

identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan serta surat perintah penahanan ditembuskan kepada keluarga.⁹

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Penahan dapat berupa penahanan rumah, penahanan negara, penahanan rumah, penahanan kota. Adapun jangka waktu penahanan tersangka atau terdakwa sebagai berikut:

- a. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama dua puluh hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari.
- b. Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling lama dua puluh hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari.
- c. Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari, apabila

⁹ A. Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media, Jakarta, 1993, hal. 164.

diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari.

d. Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari.

e. Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama puluh hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 hari.

Disamping itu, kewenangan melakukan perintah penahanan seperti yang disebut diatas, dapat diperpanjang 60 hari di setiap tingkatan, berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

4. Prosedur Penahanan

Prosedur Penahanan dan Perpanjangan Penahanan:

- a. Penahanan terhadap tersangka / terdakwa dapat diperintahkan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau oleh Hakim berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- b. Dalam masalah penahanan, maka sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan.
- c. Perhitungan pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan harus dimulai dari sejak penangkapan / penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan.
- d. Untuk menghindari kesalahpahaman di pihak Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam menghitung kapan tersangka / terdakwa harus dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan maka tenggang-tenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.
- e. Sejak perkara terdaftar di Register Pengadilan Negeri maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada Pengadilan Negeri, dan sisa masa penahanan Penuntut Umum tidak boleh diteruskan oleh Hakim.
- f. Apabila tersangka tidak ditahan maka jika Hakim bermaksud menggunakan perintah penahanan harus dilakukan dalam sidang (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).

- g. Apabila tersangka atau terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan ia dalam keadaan ditahan, maka penahanan tersebut dibantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit.
- h. Masa penahanan karena tersangka atau terdakwa diobservasi karena diduga menderita gangguan jiwa sejak tersangka atau terdakwa diobservasi ditangguhkan.
- i. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 25 KUHAP tidak dibenarkan untuk sekaligus mengalihkan jenis penahanan.
- j. Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 35, 36 PP No. 27 tahun 1983.

5. Upaya Hukum terhadap Penahanan

Selain hak untuk meminta penangguhan penahanan terhadap dirinya, baik dengan jaminan uang ataupun jaminan orang, sebagaimana telah dijelaskan diatas, tersangka atau terdakwa juga dapat melakukan suatu upaya hukum mengenai tindakan penahanan terhadap dirinya. Upaya hukum yang dimungkinkan oleh KUHAP adalah mengajukan Permohonan Praperadilan (atau yang sering

disebut juga dengan gugatan praperadilan), sebagaimana diatur dalam Pasal 77 jo. Pasal 79 KUHAP).¹⁰

Pasal 77 KUHAP berbunyi:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Pasal 79 KUHAP berbunyi:

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

6. Pengertian Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

¹⁰ M. Yahya Harahap, Op.cit

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

R. Soesilo mengatakan bahwa dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.

Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Penyidikan in concreto dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat

memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.

Hamrat Hamid dan Harun Husein mengatakan, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu

penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

7. Penyidik

Pengertian Penyidikan menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan Berdasarkan pasal 21 UU No.26 Tahun 2000 tugas penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung dan ruang lingkup penyidikan kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan. Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka sendiri itu adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini dan Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹¹

B. Tinjauan Umum tentang Penangguhan Penahanan

1. Pengertian Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau

¹¹ <http://www.hukumonline.com>, perbedaan penyelidik, penyidikan dan penyidik. Diakses pada 27 Maret 2018

terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis.¹²

Menurut H. Haris bahwa, pemberian penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim harus berdasarkan asas praduga tak bersalah atau *Presumption of innocence*, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal penangguhan penahanan ini pejabat yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa tersebut tidak diwajibkan untuk mengabulkan setiap adanya permohonan penangguhan penahanan dan dapat menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan.

Bila suatu penangguhan penahanan tersebut dikabulkan oleh pejabat yang melakukan penahanan maka berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pejabat tersebut dapat menetapkan suatu jaminan baik berupa jaminan uang atau jaminan orang. Penetapan ada atau tidaknya suatu jaminan dalam KUHAP bersifat fakultatif.¹³

¹² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHP dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Hal 162.

¹³ H. Harris, *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan dengan Penahanan yang Keliru atau Tidak Sah*, Cet-1, Bina Cipta, 1983, hal 78.

Penangguhan penahanan menurut Pasal 31 ayat (1) KUHAP adalah atas permintaan tersangka atau terdakwa penahanan dapat ditangguhkan. Dalam hal ini penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan, dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Penangguhan penahanan ini sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan.

Instansi yang berwenang untuk memberikan izin penangguhan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, hakim. Hal tersebut disesuaikan dengan tingkat pemeriksaan.

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP yang isinya berbunyi:

- a. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- b. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bahwa dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan. Dengan kata lain, dalam penangguhan, suatu penahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan undang-undang. Namun, pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan. Tentunya penangguhan ini akan diikuti dengan keharusan wajib lapor oleh tersangka selama dalam masa penahanan pada suatu instansi tersebut berlangsung.

2. Syarat, Tujuan dan Fungsi Penangguhan

Bagaimana penangguhan terjadi ditegaskan dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP. Menurut penegasan yang terdapat di dalam ketentuan ini, penangguhan penahanan terjadi:

- a. Karena permintaan tersangka atau terdakwa
- b. Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan, dan secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan
- c. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Gambaran terjadinya penangguhan penahanan seolah-olah didasarkan pada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hubungan perdata. Itu sebabnya cenderung untuk mengatakan terjadinya penangguhan penahanan berdasar perjanjian antara orang tahanan atau orang yang menjamin dengan pihak instansi yang menahan. Orang tahanan berjanji akan melaksanakan dan memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan instansi yang menahan, dan sebagai imbalan atau tegen prestasi pihak yang menahan mengeluarkan dari tahanan dengan menagguhan penahanan. Dari proses terjadinya penangguhan penahanan, masing-masing pihak melakukan prestasi dan tegen prestasi. Prestasi yang dilakukan orang tahanan atau orang yang menjamin, mematuhi syarat yang ditetapkan dan memenuhi jaminan yang ditentukan. Berarti te doen atas syarat yang ditetapkan, dan nakoming tadi, pihak yang menahan memberi imbalan sebagai tegen prestasi berupa penangguhan penahanan.

Adapun mengenai syarat apa yang harus ditetapkan instansi yang berwenang, tidak dirinci dalam Pasal 31 KUHAP. Penegasan dan rincian syarat yang harus ditetapkan dalam penangguhan penahanan, lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 tersebut. Dari penjelasan ini diperoleh penegasan syarat apa yang dapat ditetapkan instansi yang menahan.

- a. Wajib lapor
- b. Tidak keluar rumah

c. Tidak keluar kota

Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan, membebaskan kepada tahanan untuk melapor setiap hari, satu kali dalam setiap hari atau satu kali seminggu dan sebagainya. Atau pembebanan syarat bisa berupa tidak keluar rumah atau keluar kota.

Apakah ketiga syarat itu dapat sekaligus ditetapkan dalam pemberian penangguhan. Tentu dapat, instansi yang menahan dapat memilih salah satu syarat tetapi dapat juga dua syarat. Yang paling logis hanya dua syarat, yakni syarat wajib lapor ditambah salah satu syarat yang lain. Misalnya syarat wajib lapor dengan syarat tidak keluar rumah atau tidak keluar kota, karena kalau sudah ditetapkan syarat wajib lapor dengan tidak keluar rumah, kurang logis untuk menetapkan syarat tidak keluar kota. Keluar saja sudah tidak boleh, dengan sendirinya keluar kotapun tidak mungkin. Jadi kurang masuk akal jika sekaligus ketiganya ditetapkan sebagai syarat.

Wewenang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum. Pasal 31 ayat (1) tidak membatasi kewenangan penangguhan penahanan terhadap instansi tertentu saja. Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk memangguhkan penahanan. Baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim mempunyai kewenangan untuk memangguhkan penahanan,

selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridis mereka.¹⁴

Kewenangan menanggguhkan penahanan dengan sendirinya tanggal apabila tahanan sudah beralih menjadi tanggung jawab yuridis instansi yang lain. penyidik hanya berwenang menanggguhkan penahanan, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridisnya. Jika tanggung jawab yuridis atas penahanan sudah beralih penahanan kepada instansi penuntut umum. Demikian juga Pengadilan Negeri, tidak dapat mencampuri penanggihan penahanan selama tahanan masih berada dalam tanggung jawab yuridis penuntut umum. Begitu pula seterusnya, tahanan yang berada dalam tanggung jawab yuridis pengadilan negeri., penanggihan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mencampuri.

Tentang alasan penanggihan penahanan tidak ada disinggung dalam Pasal 31 KUHAP maupun dalam penjelasan pasal tersebut. Kalau begitu ditinjau dari segi yuridis, mengenai alasan penaggihan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan. Persoalan pokok bagi hukum dalam penanggihan penahanan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penanggihan. Akan teteapi, sekalipun undang-undang tidak menentukan alasan penanggihan dan memberi kebebasan dan kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Research Sosial*, Alumni Bandung, 1983, hal. 171.

atau tidak menanggukhan, sepatutnya instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan dan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis dan psikologis, penanggukan penahanan atas kejahatan tindak pidana semacam itu bertentangan dengan tujuan preventif dan korektif serta tidak mencerminkan upaya edukatif bagi anggota masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan dan kewenangan menanggukhan penahananm jangan semata-mata bertitik tolak dari sudut persyaratan dan jaminan yang ditetapkan, tapi juga harus mengkaji dan mempertimbangkan lebih dalam dari sudut yang lebih luas.

Berbicara mengenai masalah penanggukan penahanan yang diatur dalam pasal 31 KUHP belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaanya, serta bagaimanaa syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin. Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan pencabutan akan penanggukan penahanan tersebut terhadap tersangka atau terdakwa oleh pejabat yang menahannya jika syarat dan ketentuan yang diharuskan dilanggar oleh tersangka atau terdakwa.¹⁵

Pasal 31 ayat (1) KUHP tidak membatasi kewenangan penanggukan penahanan terhadap instansi tertentu saja. Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk menanggukhan

¹⁵ Loebby Loqman, 1990, *Pra Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia. Hal 50

penahanan. Baik penyidik; penuntut umum maupun hakim mempunyai kewenangan untuk menanggukhan penahanan. Selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridis mereka. Kewenangan menanggukhan penahanan dengan sendirinya tanggal apabila tahanan sudah beralih menjadi tanggung jawab yuridis instansi yang lain.

Penyidik hanya berwenang menanggukhan penahanan, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridisnya. Jika tanggung jawab yuridis atas penahanan sudah beralih ke tangan penuntut umum, tanggal kewenangan penyidik, terhitung sejak saat terjadi peralihan penahanan kepada instansi penuntut umum. Sebaliknya, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridis penyidik, penuntut umum belum mempunyai kewenangan untuk mencampuri tindakan penanggukan penahanan. Demikian juga Pengadilan Negeri, tidak dapat mencampuri penanggukan penahanan selama tahanan masih berada dalam tanggung jawab yuridis penuntut umum. Begitu juga seterusnya, tahanan yang berada dalam tanggung jawab yuridis Pengadilan Negeri, penanggukan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangannya. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mencampuri.

Bahwa faktor syarat merupakan syarat dasar dalam penanggukan penahanan, dapat dibaca dalam kalimat terakhir Pasal 31 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Berdasarkan syarat yang ditentukan". Dari

bunyi kalimat ini, penetapan syarat oleh instansi yang memberikan penangguhan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dahulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan. Tetapkan dahulu syarat dan atas syarat yang ditetapkan instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk menaati, baru instansi yang berwenang memberikan penangguhan. Dengan demikian, penetapan syarat merupakan *conditio sine quanon* dalam pemberian penangguhan.

3. Tata Cara Pengeluaran Tahanan Karena Penangguhan

Cara penengluaran tahanan karena penangguhan penahanan diatur dalam pasal 25 peraturan menteri kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983. Lengkapnya bunyi pasal 25 tersebut:

- a. Pengeluaran tahanan karena penangguhan penahan harus berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan.
- b. Dalam pembebasan penahanan dimaksud petugas rutan harus :
 1. Meneliti surat perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan
 2. Membuat berita acara pengeluaran tahanan dari rutan dan menyampaikan tembusan kepada instansi yang menahan

3. Mencatat surat-surat penangguhan penahan dan mengambil cap sidik jari, 3 jari tengah dari tangan kiri tahanan yang bersangkutan kedalam register yang disediakan
4. Memeriksa kesehatan tahanan kepada dokter rutan, dan menyampaikan kepada instansi yang menahan dan kepada tahanan
5. Menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan dititipkan kepada rutan dengan berita acara dan mencatat dalam register yang disediakan

4. Perbedaan Penangguhan Penahanan dengan Pembebasan dari Tahanan

Perintah pembebasan terdakwa dari tahanan pada dasarnya “tanpa syarat”. Jika pembebasan dibarengi dengan syarat, perintah pembebasan itu bukan lagi pembebasan. Perbedaan antara penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan, terletak pada syarat. Faktor ini merupakan dasar atau landasan pemberian penangguhan penahanan. Sedang dalam tindakan pembebasan dilakukan tanpa syarat, sehingga tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan pembebasan dari tahanan dengan penangguhan penahan, yaitu :

- a. Perintah pembebasan dilakukan hakim atau pengadilan negeri secara *ex officio* atas dasar penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa didasarkan atas alasan yang tidak sah.
- b. Perintah pembebasan penahanan dilakukan tanpa permintaan terdakwa, sekalipun hal ini tidak mengurangi hak terdakwa atau penasehat hukum untuk mengajukan jika mereka mempunyai dasar alasan yang sah
- c. Perintah pembebasan dari tahanan dilakukan “tanpa syarat”. Pembebasan dilakukan semata-mata atas alasan bahwa penahanan itu merupakan “penahanan yang tidak sah”, atau penahanan “tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan.”¹⁶

5. Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang

Jaminan orang, maka si penjamin harus membuat pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa penjamin bersedia bertanggung jawab apabila tersangka/terdakwa yang ditahan melarikan diri. Untuk itu harus ada surat perjanjian penangguhan penahanan pada jaminan yang berupa orang yang berisikan identitas orang yang menjamin dan instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin (uang tanggungan). Syarat Jaminan Orang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 27

¹⁶ Yahya Harahap, Op.cit. Hal 250

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana:

- a. Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan tahanan.
- b. Penjamin memberi “pernyataan” dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia “bersedia” dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.
- c. Identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas.
- d. Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut “uang tanggungan” (apabila tersangka/terdakwa melarikan diri).
- e. Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.

6. Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang

Jaminan Uang yang ditetapkan secara jelas dan disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan penahanan. Uang jaminan tersebut disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang penyetorannya dilakukan oleh tersangka/terdakwa atau keluarganya atau kuasa hukumnya berdasarkan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh instansi yang menahan. Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap tiga dan berdasarkan bukti setoran tersebut maka instansi yang

menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan. Syarat Jaminan Uang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- a. Jaminan uang ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
- b. Penyetoran uang jaminan ini dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya dan untuk itu panitera memberikan tanda terima.
- c. Penyetoran ini dilakukan berdasar “formulir penyetoran” yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan.
- d. Bukti setoran ini dibuat dalam rangkap tiga sesuai ketentuan angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03/1983. Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan untuk menjadi dasar bagi pejabat yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan.
- e. Apabila kemudian tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah melewati waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

7. Jatuhnya uang Jaminan Menjadi Milik Negara

Penangguhan Penahanan dengan jaminan mirip *voorwaardelijke verbintenis* yang diatur dalam Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1271 KUHPerdota. Syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian penangguhan tidak dilanggar oleh pemohon, uang jaminan secara materiil dan yuridis masih tetap merupakan hak milik pemohon. Artinya, ditinjau dari segi hukum perdata, pemohon masih tetap sebagai legal owner atau proprietary. Hanya saja uang jaminan itu untuk sementara diasingkan atau dipisahkan dari penguasaan pemohon dengan jalan menyeteror dan menitipkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri sehingga secara faktual dan riil, uang jaminan itu tidak dapat dikuasai dan dipergunakan selama perjanjian penangguhan masih berlangsung. Uang jaminan baru kembali secara riil kepada kekuasaan pemohon setelah perjanjian penangguhan penahanan berakhir. Akan tetapi jika pemohon melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian berupa tindakan “melarikan diri”, uang jaminan yang dititipkan di kepaniteraan dengan sendirinya berubah menjadi “milik negara” dan disetorkan ke kas negara oleh panitera yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) PP No. 27/1983 dan angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983.

a. Pengembalian Uang Jaminan

Uang jaminan tetap menjadi milik pemohon, hanya untuk sementara milik itu dipisahkan dari kekayaan untuk “dititipkan” di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pengembalian uang jaminan dari penitipan dapat diminta dan harus dikembalikan apabila:

b. Penangguhan penahanan dicabut kembali (revoke)

Dengan pencabutan kembali penangguhan penahanan dan memerintahkan kembali menjalani masa tahanan, dengan sendirinya pencabutan mengakhiri perjanjian penangguhan penahanan akibatnya uang jaminan dikembalikan kepada pemilik semula. Prosedur ini didasarkan atas surat pencabutan penangguhan penahanan. Atas dasar surat inilah yang bersangkutan atau penasehat hukum maupun keluarganya mengajukan permintaan pengembalian uang jaminan dari panitera Pengadilan Negeri.

a. Berdasar Putusan Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Apabila putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan sendirinya menurut hukum telah mengubah status terdakwa. Tidak menjadi soal apakah putusan yang dijatuhkan kepadanya pembedaan, pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum. Perubahan status dari

terdakwa menjadi terpidana, dengan sendirinya mengakhiri perjanjian penangguhan penahanan. Dengan kondisi tersebut pihak pihak dikembalikan kepada keadaan semula, uang jaminan kembali sepenuhnya menjadi milik yang bersangkutan baik secara materiil dan riil. Hal ini berlaku juga terhadap putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum. Dengan dijatuhkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membebaskan atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum maka berakhir perjanjian penangguhan. Maka atas dasar putusan tersebut, uang jaminan kembali menjadi hak sepenuhnya dari orang yang bersangkutan.

8. Pencabutan Penangguhan Penahanan

Jika penyidik, penuntut umum, dan hakim berwenang memberikan penangguhan penahanan, sebaliknya berwenang sewaktu-waktu mencabut kembali penangguhan penahanan. Akan tetap tentu harus diingat, pencabutan kembali penangguhan tidaklah dapat dilakukan sewenang-wenang. Harus ada dasar alasan yang layal mencabut kembali penangguhan. Hal ini diperingatkan Pasal 31 ayat (2) KUHAP. Yang memberi pedoman kepada para pejabat yang berwenang, bahwa mereka dapat bertindak melakukan pencabutan penangguhan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat-syarat yang ditentukan. Jika tersangka atau terdakwa tidak melanggar

syarat-syarat penangguhan, tidak ada alasan bagi pejabat yang bersangkutan untuk melakukan pencabutan penangguhan.

Mengenai masalah yang dihubungkan dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, tentang pengurangan ;masa tahanan dalam putusan hakim, penjeasan Pasal 31 menegaskan; masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan. Berarti masa penangguhan tahanan tidak ikut diperhitungkan dalam pengurangan hukuman yang akan dijatuhkan.

9. Akibat Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa

Suatu pelaksanaan penangguhan juga memberikan konsekuensi hukum. Adapun konsekuensi dari penangguhan penahanan tersebut adalah meliputi:

Konsekuensi bila kabur.

- a. Sebagaimana dijelaskan dengan adanya penangguhan penahanan maka seorang terdakwa tidak berada di rumah tahanan negara atau di kantor polisi untuk menjalankan pemeriksaan. Tetapi ia berada di rumahnya dengan adanya perjanjian. Dengan demikian konsekuensi bila seorang terdakwa kabur karena telah diberikan penangguhan penahanan maka dapat dijelaskan disini timbulnya kewajiban penjamin untuk menyetor uang jaminan ke kas negara melalui panitera pengadilan.

Apabila seorang terdakwa yang diberikan penangguhan penahanan melarikan diri lebih dari 3 bulan maka timbul kewajiban hukum dari pihak yang menjamin untuk menyetor uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian. Dan mengenai cara menghitung tenggang waktu 3 bulan, sama dengan apa yang sudah dijelaskan pada tenggang waktu jaminan uang, yakni 3 bulan dari tanggal yang bersangkutan melarikan diri. Jika orang yang menjamin bersedia dan mampu melaksanakan penyetoran uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian, tidak diperlukan penetapan Pengadilan Negeri. Dengan demikian adakalanya tidak diperlukan penetapan pengadilan, jika orang yang menjamin dengan sukarela bersedia dan mampu melaksanakan penyetoran uang tanggungan kepada kepaniteraan untuk seterusnya disetorkan ke kas negara sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian penangguhan penahanan. Apabila orang yang menjamin tidak melaksanakan penyetoran ke kas negara maka dengan penetapan pengadilan dapat dilakukan sita eksekusi terhadap barang pihak yang menjamin terdakwa.

b. Perbuatan yang sama Melakukan Tindak Pidana

Apabila dengan adanya penangguhan penahanan seorang terdakwa melakukan atau mengulang kembali tindak pidana yang ditimpakan kepadanya maka kepada terdakwa akan

dicabut penangguhan penahanannya. Tetapi kondisi daripada kembali mengulang perbuatan yang sama dalam suatu proses penangguhan penahanan kurang atau sangat tidak memungkinkan. Hal ini dimungkinkan penangguhan penahanan dapat dilakukan pada tindak-tindak pidana tertentu tidak pada semua kasus pidana. Penangguhan penahanan tidak akan dikabulkan dalam kasus korupsi atau pembunuhan, tetapi dapat diberikan misalnya kepada tindak-tindak pidana tertentu seperti melakukan demonstrasi tanpa izin atau mengakibatkan rusaknya sarana umum. Kondisi ini menjelaskan bahwa dibutuhkan pemikiran arif dari pihak kepolisian, jaksa penuntut umum maupun pengadilan untuk dapat mengabulkan penangguhan penahanan.¹⁷

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jilid I, Pustaka, Kartini Jakarta 1993. Hal 230.